



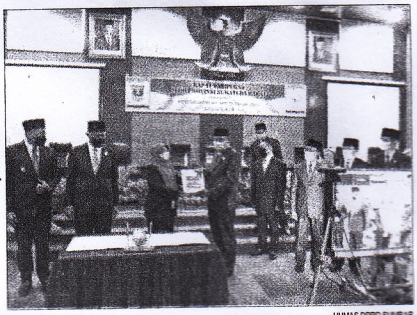
KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	7&8
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Bulan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## BPK masih Temukan Sejumlah Persoalan

**Sumbar Raih WTP 9 Kali Berturut-turut**



**HASIL WTP:** Ketua DPRD Sumbar Supardi menerima hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat TA 2020 oleh BPK RI.

Padang, Padek—Pemprov Sumbar resmi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan.

Seperti disampaikan Anggota V BPK Bahrullah Akbar, persoalan tersebut yaitu pembayaran kegiatan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 516,79 juta tidak sesuai ketentuan. Lalu pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 di BPBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 12,47 miliar tidak sesuai ketentuan.

"Akan tetapi permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Bahrullah Akbar yang mengikuti paripurna lewat daring yang dilaksanakan, kemarin (7/5).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Barat TA 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini WTP namun terdapat penekanan suatu hal atas LKPD Provinsi Sumatera Barat TA 2020.

BPK menekankan pada catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang menyajikan realisasi Belanja Tak Terduga

sebesar Rp 445,66 miliar, yang di antaranya direalisasikan sebesar Rp 156,19 miliar untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh BPBD Sumbar.

Dalam hal ini BPBD Sumbar tidak merancang dan melaksanakan suatu pengendalian yang memadai untuk memastikan pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19 telah memenuhi ketentuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

"BPBD harus membuat suatu pengendalian yang memadai agar seluruh proses pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19 memenuhi ketentuan sehingga tidak terjadi kecurangan," katanya.

Lewat opini WTP atas LKPD 2021 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecua-

lian selama sembilan kali berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

BPK secara bersamaan juga melakukan pemeriksaan kinerja atas program pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan, yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah di 2020. "Memeriksa kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan dalam rangka mendukung tersedianya sarana dan prasarana bagi aparaturnya dan masyarakat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.

► Baca BPK...Hal 7

## BPK masih Temukan Sejumlah Persoalan

*Sambungan dari hal. 8*

Dalam pemeriksaan kinerja tersebut BPK menemukan masalah signifikan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan utama yang dijumpai yaitu program/kegiatan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan syarat-syarat perencanaan yang memadai, dan

pelaksanaan fisik atas lima kegiatan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan belum mempunyai target penyelesaian dan belum sesuai dengan kesepakatan kontrak.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian diterima kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Prestasi kali ini merupakan yang kesembilan kali diterima Pemprov Sumbar secara berturut-turut. Yaitu, sejak 2012 sampai dengan 2020. Hasil ini merupakan hasil kerja keras semua pihak di

Pemrov Sumbar.

"Alhamdulillah dari hasil LHP BPK kita meraih WTP, mudah-mudahan ketaatan kita pada pengaturan keuangan akan lebih meningkat lagi ke depannya," harap Mahyeldi.

Ia mengungkapkan, akan segera menindaklanjuti sejumlah catatan dari BPK yang akan dikerjakan enam bulan ke depan. Ke depannya harus ada perbaikan agar jangan sampai ada kesalahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, meraih WTP bukan berarti sudah sempurna semuanya. Masih ada bebe-

rapa temuan yang mesti ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan OPD terkait. "Mudah-mudahan dari hasil LHP BPK bisa ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan, apa yang direkomendasikan BPK bisa diwujudkan," katanya.

DPRD akan berperan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK itu lewat komisi terkait. Beberapa rekomendasi akan menjadi acuan untuk melakukan pengawasan.

Pada paripurna secara luring, juga dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi, serta forkopimda Sumbar. (eko)